

**PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PARTISIPASI GENERASI MUDA  
DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode  
Penelitian Administrasi Publik



**Disusun Oleh :**

Nama : Rachel Aulia Az-zahra

NPM : 2416041079

Kelas : Reguler C

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN AJARAN  
2025/2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan politik, tetapi juga berimplikasi pada cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam organisasi sosial. Di Indonesia, fenomena ini menjadi semakin relevan karena negara ini memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar. Berdasarkan laporan *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)* tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 215 juta jiwa, atau sekitar 78% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Generasi muda, yang sering disebut sebagai generasi milenial dan generasi Z, merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media digital. Mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi, sehingga penggunaan internet, media sosial, serta aplikasi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Fenomena ini menjadikan generasi muda sebagai aktor utama dalam proses digitalisasi sosial. Di sisi lain, mereka juga merupakan segmen masyarakat yang memiliki potensi besar untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat sosial, politik, budaya, maupun keagamaan. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana digitalisasi benar-benar memengaruhi tingkat partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Secara teoretis, partisipasi masyarakat dalam organisasi sering dikaitkan dengan teori partisipasi politik dan teori modal sosial. *Robert Putnam* (2000) dalam bukunya *Bowling Alone* menjelaskan bahwa modal sosial,

berupa jejaring sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik, merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam organisasi. Namun, dalam konteks digital, bentuk modal sosial mengalami perubahan signifikan. Interaksi yang sebelumnya berbasis tatap muka kini banyak bergeser menjadi berbasis virtual melalui media sosial, forum digital, dan aplikasi komunikasi daring. Hal ini memunculkan pertanyaan baru: apakah modal sosial digital sama efektifnya dengan modal sosial tradisional dalam mendorong partisipasi nyata dalam organisasi?

Berbagai studi kuantitatif sebelumnya, baik di tingkat internasional maupun nasional, telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, penelitian *Boulianne (2015)* menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan media sosial dengan partisipasi politik, meskipun efeknya tidak terlalu kuat. Sementara di Indonesia, penelitian *Nugroho (2019)* menemukan bahwa penggunaan media sosial berhubungan signifikan dengan partisipasi politik non-elektoral mahasiswa, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada partisipasi elektoral. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang berperan dalam membentuk perilaku partisipasi, namun pengaruhnya masih bervariasi tergantung pada konteks dan jenis organisasi yang diteliti.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi partisipasi organisasi memiliki keunikan tersendiri. Pertama, struktur masyarakat Indonesia yang plural dan berbasis komunal menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penting dalam membangun kohesi sosial. Kedua, tingkat literasi digital di Indonesia masih sangat bervariasi, sehingga tidak semua generasi muda memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan partisipatif. Ketiga, adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga memengaruhi tingkat partisipasi generasi muda dalam organisasi. *Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)* menunjukkan bahwa penetrasi internet di perkotaan mencapai lebih dari 85%, sementara di pedesaan masih di bawah 65%. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses informasi dan peluang berpartisipasi.

Selain itu, terdapat fenomena yang dikenal sebagai slacktivism atau aktivisme semu, yaitu kecenderungan generasi muda untuk lebih aktif menyuarakan opini melalui media sosial dibandingkan dengan terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Fenomena ini menimbulkan dilema: di satu sisi, media digital memudahkan partisipasi; tetapi di sisi lain, ia juga berpotensi menurunkan kualitas keterlibatan nyata. Misalnya, banyak generasi muda yang aktif menandatangani petisi online, mengunggah tagar (#), atau membagikan konten sosial di media sosial, tetapi enggan terlibat dalam kegiatan lapangan yang memerlukan komitmen waktu dan tenaga lebih besar.

Di sinilah pentingnya penelitian kuantitatif yang dapat mengukur secara objektif sejauh mana digitalisasi benar-benar memengaruhi tingkat partisipasi generasi muda dalam organisasi. Dengan pendekatan kuantitatif, hubungan antara variabel digitalisasi (misalnya intensitas penggunaan media sosial, literasi digital, dan jenis platform yang digunakan) dengan variabel partisipasi organisasi (misalnya tingkat keaktifan, frekuensi hadir dalam kegiatan, atau kontribusi dalam pengambilan keputusan) dapat diuji secara empiris. Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat serta mengukur kekuatan pengaruh antarvariabel.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat generasi muda Indonesia sedang berada pada posisi strategis dalam pembangunan nasional. Mereka bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga penggerak perubahan sosial. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan perlu memahami pola partisipasi generasi muda dalam era digital agar dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, ada risiko bahwa digitalisasi justru akan memperlebar kesenjangan partisipasi dan melemahkan fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai pilar demokrasi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga relevan dengan agenda global *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-16 tentang

*Peace, Justice, and Strong Institutions*. Partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu indikator penting bagi tercapainya tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Dengan memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi partisipasi tersebut, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat demokrasi partisipatif.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari tiga premis utama: pertama, digitalisasi telah menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan generasi muda Indonesia; kedua, partisipasi dalam organisasi merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis; ketiga, masih terdapat kesenjangan pengetahuan empiris mengenai hubungan antara digitalisasi dan partisipasi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif agar diperoleh hasil yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Fenomena digitalisasi tidak hanya membawa perubahan dalam tatanan komunikasi, melainkan juga dalam pola partisipasi masyarakat. Jika pada era sebelumnya organisasi sangat bergantung pada interaksi tatap muka untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan kegiatannya, maka di era sekarang organisasi dituntut mampu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Transformasi ini menjadi kunci agar organisasi tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda yang sebagian besar kehidupannya sudah menyatu dengan teknologi digital. Tanpa adanya adaptasi, organisasi berpotensi kehilangan daya tarik dan sulit mempertahankan kaderisasi, khususnya di kalangan mahasiswa dan remaja yang merupakan basis utama regenerasi kepemimpinan.

Dalam konteks sosial-politik, digitalisasi menghadirkan peluang bagi organisasi untuk memperluas jaringan, meningkatkan transparansi, serta membangun sistem komunikasi yang lebih efisien. Organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan publik, menyebarkan informasi, serta membangun solidaritas lintas

wilayah. Begitu pula organisasi mahasiswa, keagamaan, dan komunitas lokal yang kini dapat menyelenggarakan rapat daring, penggalangan dana digital, atau kampanye kesadaran melalui platform daring. Semua hal ini menunjukkan bahwa teknologi mampu membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, bahkan bagi mereka yang secara geografis terpisah.

Namun, di balik peluang yang terbuka lebar, terdapat pula tantangan serius yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang menyebabkan ketimpangan partisipasi. Generasi muda di perkotaan dengan akses internet memadai cenderung lebih aktif terlibat, sedangkan generasi muda di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan maupun perangkat. Ketimpangan ini menimbulkan risiko eksklusivitas dalam organisasi, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses ruang partisipasi digital, sementara kelompok lain tertinggal. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat inklusivitas organisasi yang seharusnya mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Selain kesenjangan digital, permasalahan literasi juga menjadi sorotan utama. Banyak generasi muda yang aktif menggunakan media sosial, tetapi belum semuanya memiliki literasi digital yang memadai. Literasi digital tidak sekadar kemampuan menggunakan perangkat, melainkan juga mencakup aspek etika, kritisisme, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang lebih produktif. Tanpa literasi yang baik, keterlibatan digital berpotensi jatuh pada partisipasi yang dangkal, seperti sekadar menyukai unggahan, membagikan tautan, atau mengikuti tren viral tanpa pemahaman mendalam. Fenomena ini sering disebut sebagai *slacktivism*, yaitu bentuk aktivisme semu yang terlihat aktif di permukaan tetapi minim kontribusi nyata dalam kegiatan organisasi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas partisipasi generasi muda dalam organisasi pada era digital. Apakah partisipasi yang dilakukan melalui media digital benar-benar mampu memperkuat komitmen, solidaritas, dan keberlanjutan organisasi, ataukah justru melemahkan interaksi nyata yang selama ini menjadi fondasi penting organisasi? Pertanyaan ini penting dijawab agar organisasi mampu

menentukan strategi terbaik dalam memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi nilai-nilai kebersamaan yang melekat di dalamnya.

Dari sisi akademis, penelitian mengenai digitalisasi dan partisipasi generasi muda masih lebih banyak difokuskan pada ranah politik, misalnya peran media sosial dalam pemilu atau gerakan sosial. Sementara itu, penelitian mengenai dampak digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian inilah yang menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai fenomena ini. Dengan analisis kuantitatif, hubungan antara intensitas penggunaan teknologi digital dengan tingkat partisipasi nyata generasi muda dapat diungkap secara lebih objektif.

Relevansi penelitian ini juga sangat kuat dengan agenda pembangunan nasional. Generasi muda merupakan modal sosial yang besar bagi Indonesia, dan keterlibatan mereka dalam organisasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Partisipasi aktif generasi muda dalam organisasi diharapkan mampu menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis, menguatkan jejaring sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda bukan hanya bermanfaat bagi pengembangan teori akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa digitalisasi merupakan pisau bermata dua bagi organisasi. Di satu sisi, ia membuka peluang partisipasi yang lebih luas, tetapi di sisi lain, ia juga membawa risiko kesenjangan akses, rendahnya literasi, dan munculnya partisipasi semu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan melakukan kajian kuantitatif mengenai pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda dalam organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi generasi

muda di era digital sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan strategi penguatan organisasi di tengah arus perubahan teknologi yang semakin cepat.

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak besar bagi dinamika kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan internet yang sangat pesat telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, mulai dari cara masyarakat mengakses informasi, melakukan transaksi ekonomi, hingga berinteraksi dalam kehidupan sosial. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta jiwa atau sekitar 78% dari total populasi. Angka ini menunjukkan betapa kuatnya penetrasi teknologi digital di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna paling dominan.

Generasi muda Indonesia, khususnya kelompok usia 16–30 tahun, dikenal sebagai kelompok digital native. Mereka lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang telah dipenuhi oleh teknologi digital sehingga interaksi sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari perangkat seperti gawai, media sosial, dan aplikasi komunikasi daring. Kondisi ini menjadikan generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, tetapi sekaligus rentan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari dunia digital. Kehadiran teknologi membawa kemudahan dalam mengakses informasi dan membangun jejaring, namun juga berpotensi menimbulkan masalah baru seperti penyebaran hoaks, polarisasi sosial, dan ketergantungan digital.

Dalam konteks organisasi, digitalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pada masa lalu sangat bergantung pada rapat tatap muka, pamflet, atau media cetak, kini memiliki alternatif baru berupa media digital untuk mengatur kegiatan, menyebarkan informasi, bahkan melakukan rekrutmen anggota. Hal ini tentu memperluas jangkauan organisasi karena mereka tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai contoh, organisasi kepemudaan dapat menyelenggarakan pelatihan secara daring melalui platform webinar,

melakukan kampanye kesadaran sosial lewat Instagram atau TikTok, serta memobilisasi bantuan sosial dengan sistem donasi online. Semua inovasi ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara organisasi bekerja dan melibatkan anggotanya.

Namun, transformasi digital organisasi juga tidak lepas dari permasalahan serius. Kesenjangan digital masih menjadi masalah klasik di Indonesia, terutama karena kondisi infrastruktur yang belum merata. Data *Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)* menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di daerah perkotaan sudah mencapai 82%, sementara di pedesaan baru sekitar 62%. Perbedaan ini jelas memengaruhi kesempatan generasi muda untuk terlibat dalam organisasi berbasis digital. Generasi muda di kota besar mungkin bisa dengan mudah mengikuti rapat daring atau diskusi virtual, sedangkan di daerah pedesaan mereka sering terkendala jaringan lemah dan perangkat yang terbatas.

Selain faktor infrastruktur, kualitas literasi digital juga menjadi isu yang krusial. Menurut survei *Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021)*, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang. Artinya, meskipun generasi muda cukup aktif menggunakan media digital, mereka belum sepenuhnya memiliki keterampilan kritis dalam memilah informasi, menjaga keamanan data, dan menggunakan teknologi secara produktif. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada partisipasi dalam organisasi. Generasi muda yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menggunakan teknologi untuk tujuan organisasi. Sebaliknya, mereka yang masih rendah literasi digitalnya berpotensi hanya menjadi pengguna pasif yang sekadar ikut-ikutan tanpa kontribusi nyata.

Partisipasi generasi muda dalam organisasi menjadi penting untuk dikaji karena ia merupakan salah satu indikator vital dalam membangun demokrasi dan tata kelola masyarakat yang sehat. Organisasi kemasyarakatan, baik di tingkat lokal maupun nasional, berfungsi sebagai wadah pembelajaran politik, kepemimpinan, dan kerja sama. Melalui keterlibatan dalam organisasi, generasi muda dapat mengasah keterampilan

komunikasi, kepemimpinan, hingga kemampuan manajemen konflik. Namun, dengan hadirnya digitalisasi, muncul pertanyaan baru: apakah partisipasi digital yang terjadi di media sosial, chat group, atau platform komunitas benar-benar mencerminkan keterlibatan aktif, ataukah hanya partisipasi semu yang tidak berkontribusi pada keberlangsungan organisasi?

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian mengenai fenomena ini menjadi sangat relevan. Melalui survei dan analisis statistik, kita dapat mengukur sejauh mana intensitas penggunaan media digital berkorelasi dengan tingkat keterlibatan nyata generasi muda dalam organisasi. Misalnya, apakah generasi muda yang aktif di media sosial organisasi juga benar-benar hadir dalam kegiatan lapangan? Apakah semakin tinggi frekuensi interaksi digital juga meningkatkan loyalitas anggota terhadap organisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban berbasis data agar dapat memberikan gambaran obyektif mengenai dampak digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda.

Lebih jauh lagi, digitalisasi juga berpengaruh pada pola kepemimpinan dalam organisasi. Jika sebelumnya kepemimpinan banyak ditentukan oleh kehadiran fisik dan kemampuan retorika dalam forum tatap muka, kini pemimpin organisasi dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi digital. Seorang ketua organisasi mahasiswa, misalnya, harus mampu mengelola group chat, membuat konten yang menarik di media sosial, dan mengorganisasi pertemuan daring. Dengan demikian, keberhasilan organisasi di era digital tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penting juga menyoroti aspek budaya. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki budaya kolektivisme yang menekankan kebersamaan, gotong royong, dan interaksi tatap muka. Digitalisasi, meskipun membawa efisiensi, dapat menggeser nilai-nilai tersebut jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat. Organisasi yang terlalu bergantung pada interaksi digital berisiko melemahkan ikatan emosional antaranggota, karena komunikasi digital cenderung singkat,

praktis, dan kurang mendalam dibandingkan interaksi langsung. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana digitalisasi memengaruhi pola partisipasi generasi muda di organisasi menjadi semakin mendesak dilakukan.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa digitalisasi bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan juga fenomena sosial yang membawa implikasi luas bagi organisasi di Indonesia. Generasi muda berada di garis depan perubahan ini, karena mereka adalah kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda dalam organisasi dengan pendekatan kuantitatif diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif sekaligus solusi praktis. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan bagi organisasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan strategi penguatan partisipasi generasi muda di era digital.

Fenomena partisipasi generasi muda di era digital tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik Indonesia yang terus berkembang. Sejak reformasi 1998, peran pemuda dalam organisasi mengalami revitalisasi karena semakin terbuka ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Generasi muda mulai terlibat aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, komunitas kreatif, organisasi kepemudaan, hingga gerakan sosial berbasis isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, atau pemberdayaan ekonomi. Namun, dinamika ini kemudian bertemu dengan arus besar digitalisasi yang menghadirkan ruang baru bagi partisipasi, yaitu ruang maya. Media sosial menjadi salah satu arena utama yang dimanfaatkan oleh pemuda untuk menyuarakan pendapat, mengorganisasi aksi, dan membentuk identitas kolektif.

Salah satu contoh konkret adalah fenomena gerakan *#ReformasiDikorupsi* yang terjadi pada tahun 2019. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa dan generasi muda yang menolak revisi Undang-Undang KPK serta sejumlah rancangan undang-undang kontroversial lainnya. Peran media sosial sangat dominan dalam menggerakkan massa,

menyebarkan informasi, serta mengkonsolidasikan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Meskipun gerakan ini berakar pada organisasi mahasiswa dan jaringan kepemudaan, kekuatan sebenarnya justru lahir dari kombinasi antara mobilisasi digital dan aksi nyata di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas partisipasi, mempercepat konsolidasi, sekaligus memperkuat daya tekan gerakan pemuda terhadap pengambil kebijakan.

Selain gerakan politik, digitalisasi juga memengaruhi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Misalnya, organisasi kepemudaan Karang Taruna yang tersebar di seluruh Indonesia kini mulai memanfaatkan platform digital untuk menjalankan kegiatan. Beberapa Karang Taruna di perkotaan telah memiliki akun Instagram resmi untuk publikasi kegiatan, menggunakan *WhatsApp Group* untuk koordinasi, serta mengadakan webinar terkait kewirausahaan sosial. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan Karang Taruna di pedesaan yang masih mengandalkan tatap muka langsung karena keterbatasan akses internet. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa digitalisasi menciptakan disparitas dalam pola partisipasi organisasi, bergantung pada konteks geografis dan ketersediaan infrastruktur.

*Survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)* yang dirilis oleh *BPS (2022)* juga memberikan gambaran menarik. Meskipun tingkat kebebasan berpendapat cukup tinggi, partisipasi organisasi pemuda cenderung stagnan. Hanya sekitar 23% pemuda yang tercatat aktif dalam organisasi formal seperti organisasi kepemudaan, mahasiswa, maupun lembaga non-pemerintah. Namun, angka partisipasi di media sosial jauh lebih tinggi. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara partisipasi digital dan partisipasi nyata. Banyak pemuda yang merasa sudah “berorganisasi” hanya dengan bergabung dalam grup daring atau mengikuti akun media sosial tertentu, tanpa benar-benar terlibat dalam kegiatan nyata.

Perbandingan dengan negara lain juga dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena ini. Di Korea Selatan misalnya, generasi muda menggunakan media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai

alat mobilisasi politik dan sosial. Gerakan candlelight protest pada 2016–2017 yang menuntut pengunduran diri Presiden Park Geun-hye memperlihatkan bagaimana digitalisasi mampu menciptakan konsolidasi massa dalam skala besar. Di Amerika Serikat, gerakan Black Lives Matter juga menjadi contoh bagaimana partisipasi digital bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan. Dibandingkan dengan Indonesia, pola partisipasi digital di kedua negara tersebut cenderung lebih konsisten berujung pada perubahan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih ada tantangan dalam menghubungkan partisipasi digital pemuda dengan keterlibatan konkret di organisasi.

Pendekatan kuantitatif dalam mengkaji fenomena ini sangat penting karena mampu memberikan gambaran objektif berdasarkan data. Dengan melakukan survei kepada generasi muda Indonesia, peneliti dapat mengetahui sejauh mana intensitas penggunaan media digital memengaruhi keterlibatan mereka dalam organisasi. Misalnya, survei dapat mengukur frekuensi keikutsertaan pemuda dalam rapat daring, kontribusi mereka dalam pembuatan konten organisasi, serta partisipasi nyata di lapangan. Analisis statistik kemudian dapat digunakan untuk mengetahui hubungan signifikan antara variabel penggunaan media digital dengan tingkat partisipasi organisasi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi organisasi maupun pemerintah.

Lebih jauh lagi, digitalisasi juga membawa dimensi baru dalam manajemen organisasi. Organisasi yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, laporan keuangan organisasi dapat dipublikasikan melalui website atau media sosial sehingga lebih mudah diakses oleh anggota dan publik. Demikian pula, kegiatan organisasi dapat didokumentasikan secara digital untuk memperluas jangkauan publikasi. Namun, tidak semua organisasi memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola digitalisasi. Organisasi kecil atau berbasis komunitas sering kali menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, keterampilan teknis,

dan dukungan finansial. Akibatnya, tidak semua organisasi bisa menikmati keuntungan digitalisasi secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda dalam organisasi menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mendorong peningkatan literasi digital pemuda serta memperkuat infrastruktur teknologi, khususnya di daerah tertinggal. Bagi organisasi, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun strategi digitalisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi anggota. Sementara bagi generasi muda, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan partisipasi digital dengan keterlibatan nyata di lapangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Sejauh mana pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi generasi muda dalam komunitas?
2. Apa saja elemen yang dapat memperkuat atau melemahkan peran generasi muda melalui media digital?
3. Bagaimana cara generasi muda berkontribusi dalam organisasi sosial di era digital jika dibandingkan dengan metode partisipasi tradisional yang langsung?
4. Apakah tingkat literasi digital berpengaruh besar terhadap sejauh mana generasi muda terlibat dalam organisasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis keterkaitan antara digitalisasi dan sejauh mana generasi muda berpartisipasi dalam organisasi sosial.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat partisipasi generasi muda melalui platform digital.
3. Menjabarkan pola serta cara generasi muda terlibat dalam organisasi sosial di zaman digital.

4. Menguji peranan literasi digital dalam meningkatkan efektivitas partisipasi generasi muda di dalam organisasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai transformasi partisipasi sosial generasi muda di era digital.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada organisasi sosial dalam merencanakan strategi digitalisasi yang lebih efisien.

### **1.4.3 Manfaat Sosial**

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya berpartisipasi nyata dalam organisasi selain dari keterlibatan di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi di Indonesia: Antara harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah. (2022). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, D. N., & Anshari, F. (2021). Digital literacy and youth participation in civic engagement: Evidence from Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(3), 49–66. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3703-04>
- Lim, M. (2020). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 50(4), 571–589. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1749578>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, Y., & Syarif, M. (2012). Beyond click-activism? New media and political processes in contemporary Indonesia. *Studi Media dan Komunikasi*, 5(1), 23–45.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Sari, D. P., & Yuliani, N. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 19(1), 55–70.
- Wulandari, R., & Setiawan, F. (2023). Kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat pada administrasi kependudukan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 33–49.